

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan pendidikan antikorupsi, SMK 1 Kwanyar Bangkalan, sangat memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen seperti; menentukan metode kerja, pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan dan latihan, melakukan sistem dan besarnya imbalan itu dimaksudkan untuk meningkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.
2. Dalam pertumbuhan dan pembinaan moral di SMK N 1 Kwanyar Bangkalan, yang didahulukan adalah tindak moral (*moral behavior*). Caranya yaitu dengan melatih anak untuk bertingkah laku menurut ukuran-ukuran lingkungan dimana ia hidup sesuai dengan umur yang dilaluinya. Setelah si anak terbiasa bertindak sesuai yang dikehendaki oleh aturan-aturan moral dan kecerdasan serta kematangan berpikir telah tercapai, barulah pengertian-pengertian yang abstrak diajarkan.
3. Manajemen pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral siswa sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa di SMK N 1 Kwanyar

Bangkalan. Adanya pendidikan antikorupsi ini sangat berperan dalam membentuk moral siswa karena pendidikan anti korupsi disini akan menjadikan siswa berperilaku jujur dalam kesehariannya. Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik serta membangun moral anak bangsa.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan, di antaranya:

1. Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi integratif-inklusif (disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada) dan eksklusif (mata pelajaran khusus / tersendiri).
2. Mengingat PAI dan pendidikan kewarganegaraan memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum-kemasyarakatan (sosial) maupun individu. Model pendidikan antikorupsi hendaknya bersifat integratif-inklusif dalam pembelajaran secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran.